

Jokowi Minta Industri Pertahanan Dalam Negeri Dikembangkan

MALANG - Presiden Joko Widodo minta dilakukan pengembangan terhadap industri pertahanan dalam negeri karena potensi pasar luar negeri dari sektor tersebut cukup besar.

Dalam kunjungannya di PT Pindad di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (24/7), Jokowi mengatakan industri pertahanan dalam negeri saat ini memiliki peluang yang menjanjikan. "Saya ingin menggarisbawahi bahwa industri pertahanan di negara kita memang memiliki prospek yang baik dan memang harus dikembangkan," kata Jokowi.

Dalam peninjauannya terhadap fasilitas produksi munisi PT Pindad, yang terletak kurang lebih 30 kilometer dari Kota Malang tersebut, Jokowi mengatakan hal itu untuk melihat potensi yang dimiliki Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) itu.

Menurut Jokowi, potensi yang dimiliki sektor industri per-

tahanan dalam negeri cukup menjanjikan. Hal itu mengingat saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara, ada pertanyaan terkait produk-produk yang dihasilkan industri pertahanan Indonesia. "Pada setiap kunjungan saya ke negara-negara lain, mereka selalu bertanya hal yang berkaitan dengan produk ini, (seperti) peluru," tambahnya.

Selain potensi dari produk peluru buatan industri pertahanan dalam negeri, sejumlah produk lain yang juga diminati pasar luar negeri antara lain kendaraan taktis dan senjata. Dalam upaya untuk mengembangkan PT Pindad tersebut, Jokowi telah melakukan pembahasan internal. Sehingga, dia berharap PT Pindad dapat menjadi lebih baik dalam



ANTARA/HO-BPMI Setpres-Laily Rachev/pri
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Pasar Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Senin (24/7/2023).

mengembangkan produksi jika memiliki mitra.

"Pada rapat internal tadi, saya sampaikan bahwa akan lebih baik kalau kita bermitra. Akan lebih baik kalau kita mencari partner, sehingga pengembangan dari PT Pindad ini akan lebih cepat," jelasnya.

Dalam kesempatan itu,

Jokowi menyampaikan bahwa PT Pindad telah diberikan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 700 miliar pada tahun 2015. Usai disuntik PMN, perusahaan tersebut mampu meningkatkan produksi peluru dari sebelumnya 275 juta butir menjadi 413 juta butir per tahun. "Sebelum diberi PMN, produksi

PT Pindad untuk peluru ini sebanyak 275 juta peluru (per tahun). Kemudian, setelah kami beri PMN sebesar Rp 700 miliar, produksi peluru meningkat menjadi 415 juta peluru. Jadi, hampir dua kali lipat," ujar Jokowi. PT Pindad menghasilkan berbagai jenis dan kategori produk munisi. (ANTARA)

HASIL PERTEMUAN MENLU ASEAN KE-56

Rangkaian Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM/PMC) ke-56 yang digelar 11-14 Juli 2023 di Jakarta dan dihadiri 27 pejabat tingkat menteri menghasilkan sejumlah kesepakatan berikut.

HASIL PERTEMUAN

- Memperkokoh solidaritas negara ASEAN untuk menghadapi tantangan masa depan.
- Menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai.
- Menjadikan Asia Tenggara pusat pertumbuhan berbagai bidang melalui penguatan kerja sama.
- ASEAN Regional Forum sepakat memperkuat diplomasi pencegahan di tengah rivalitas di Indo-Pasifik.
- Mendorong penerapan kesepakatan penanganan konflik di Myanmar.
- Menjadikan ASEAN kekuatan musyawarah dan kontributor utama perdamaian dan stabilitas kawasan.
- Memperkuat kerja sama antara Sekretariat ASEAN dengan Pacific Island Forum (PIF) dan Ocean Rim Association (IORA).

TENTANG AMM/PMC

- Beberapa menlu negara-negara ASEAN yang hadir pada AMM 2023, di antaranya Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam dan Kamboja.
- Merupakan pertemuan tahunan menlu negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara mitra.
- AMM 2023 turut dihadiri delegasi dari sejumlah negara mitra, yakni India, Selandia Baru, Rusia, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Kanada dan Amerika Serikat.

PERTEMUAN BILATERAL YANG DILAKUKAN INDONESIA

Di antaranya:

- Indonesia-Selandia Baru
- Indonesia-Cina
- Indonesia-India
- Indonesia-Jepang
- Indonesia-Amerika Serikat

"Seluruh rangkaian pertemuan berjalan dengan baik, diskusi sangat terbuka, sangat dinamis. Sebagai *chair* (ketua), Indonesia berusaha membangun dan menyediakan ruang dialog yang nyaman."

Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri

HOTLINE ANTARA 0812-8825-9462

Menkes Gagas Gerakan Anak Sehat Atasi Stunting

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membangun kolaborasi sosial untuk mengatasi stunting di 50 kabupaten/kota di Indonesia melalui Gerakan Anak Sehat.

"Rencana bulan ini kami meluncurkan Gerakan Anak Sehat. Ini untuk 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang memang stuntingnya perlu perhatian khusus," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri Rapat Koordinasi Stunting di Balai Kota Jakarta, Senin (24/7).

Wilayah kabupaten/kota yang dimaksud tersebar di lima provinsi dengan jumlah kasus stunting terbanyak dan menyumbang 51 persen kasus nasional, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara.

Budi mengatakan Gerakan Anak Sehat akan melibatkan semua komponen masyarakat,

mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, swasta, komunitas, hingga keluarga, untuk memastikan seluruh intervensi stunting tidak salah arah. Sasaran utama dari gerakan itu adalah mencegah anak tidak mengalami stunting akibat kekurangan asupan gizi yang seimbang.

Hal terpenting dalam menangani stunting, kata Budi, adalah memastikan asupan protein hewani sampai ke dalam mulut anak. "Pentingnya adalah makanan itu masuk ke mulut dan itu tidak mungkin kami di pusat bisa mengontrol, karena itu yang paling susah. Harus benar-benar masyarakat membantu, sama seperti vaksinasi," katanya.

Budi mengatakan Gerakan Anak Sehat merupakan respons atas Program Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diluncurkan Pemerintah pada

awal 2023, melalui penataan sasaran intervensi di masing-masing daerah. DKI Jakarta akan menjadi titik awal Gerakan Anak Sehat dengan pertimbangan komitmen pemerintah yang kuat dalam menangani 798.107 balita rawan gizi di wilayah setempat. "Kami tadi setuju datanya dibuat transparan dan penimbangan dilakukan untuk seluruh balita, itu banyak daerah yang belum timbang. DKI ini yang paling komitmen dan siap untuk bisa menimbang 798 ribu balita," katanya.

Setelah seluruh balita ditimbang, kata Budi, akan muncul balita ber kriteria rawan gizi yang memerlukan asupan protein hewani, seperti ikan, telur, daging dan sebagainya. Kemenkes juga mendorong kolaborasi dengan swasta untuk mendanai intervensi tersebut melalui peran orang tua asuh.

Sedangkan partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memastikan asupan gizi seimbang dan makanan berprotein hewani masuk ke mulut balita sasaran, kata Budi menambahkan. "Yang paling sulit adalah memastikan begitu kami bantu, itu makanan jadi protein hewani yang masuk ke mulut balitanya. Gimana memastikan dan menjaganya?, kami butuh partisipasi masyarakat seluas-luasnya," katanya. (ANTARA)



ANTARA/Siti Nurhaliza/pri
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan keterangan pers.



PEMILU 2024 tinggal hitungan bulan lagi. Pemutakhiran data pemilih menjadi hal sangat penting dalam tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Data pemilih yang dilakukan pemutakhiran dalam pemilu 2024 adalah data pemilu terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkesinambungan kemudian dicocokkan dan disinkronkan dengan data kependudukan dari Kemendagri dan menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

DP4 inilah yang kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) dalam masa cockpit selama satu bulan yaitu mulai tanggal 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023.

Untuk menyukseskan hal tersebut, KPU melakukan rekrutmen Pantarlih seluruh

Indonesia pada 26-30 Januari 2023. Pantarlih tersebut tersebar di seluruh kabupaten, desa hingga ke pelosok nusantara, bahkan hingga luar negeri. Pantarlih sendiri dibentuk dan dilantik oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) atas nama KPU kabupaten/kota.

Tak hanya sekedar mencocokkan data pemilih, para petugas Pantarlih ini juga memberikan pengetahuan kepada warga tentang proses dan tahapan pemilihan umum. Bahkan mereka juga harus menemui bermacam cerita suka dan duka ketika berinteraksi dengan masyarakat.

Setiap Pantarlih Pemilu 2024 akan mendapatkan gaji sebesar Rp 1 juta per bulannya. Sehingga, total dari besaran gaji Pantarlih Pemilu 2024 yang didapat Pantarlih selama dua bulan adalah Rp 2 juta.

Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab tanpa diskriminasi termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui data dirinya sebagai pemilih secara mudah. Petugas ini juga melayani warga untuk memperbaiki data dirinya apabila terdapat kekeliruan atau perubahan elemen data.

Para Pantarlih ini memegang prinsip kerja cermat, tertib, efektif, dan akuntabel, sehingga meningkatkan dan menghasilkan kualitas daftar pemilih. Mereka mengemban tugas mulia untuk memastikan dan melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya untuk pesta demokrasi 2024.

Foto dan teks: Iggyog, Bagus K, Irwansyah, Indrianto ES, Makna Z, Oky L, Nova W, Arif F.

ARTIKEL

Memperkuat Pertanian Guna Mendukung Ketahanan Pangan IKN

Oleh M Ghofar

PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sampai saat ini terus dikedir. Selain mendirkan bangunan-bangunan utama sebagai sarana prasarana sebuah ibu kota baru, kepastian ketersediaan pangan untuk penghuni IKN pun disiapkan sejak dini. Apalagi mulai akhir tahun ini atau tahun depan direncanakan sudah mulai ada aparat sipil negara dipindahkan ke IKN. Keberadaan mereka tentu membutuhkan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti air, listrik, dan pangan.

Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk 3,79 juta jiwa sampai saat ini masih mendatangkan sebagian kebutuhan pangan dari luar. Keberadaan IKN tentu akan menambah populasi di provinsi ini, yang juga harus dibarengi dengan ketersediaan pangan. Bahan pangan yang didatangkan meliputi produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan seperti daging sapi, kambing, dan lainnya, terutama sapi yang masih 72 persen didatangkan dari luar daerah.

Kebutuhan pangan akan bertambah ketika ada penambahan penduduk di IKN, yakni dimulai pada 2023 yakni sebagian ASN pindah sebagai persiapan menyongsong IKN pada 2024. Bahkan diperkirakan pada 2045 di kawasan IKN saja dihuni sekitar 1,9 juta jiwa. Jaminan ketersediaan pangan itu pula yang ditegaskan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Myrna A. Safitri ketika berbincang dengan awak media di Samarinda pekan lalu.

Saat ini, misalnya, di kawasan inti IKN sudah tersedia 24,7 hektare (ha) lahan

pertanian yang keberadaannya akan dioptimalkan untuk membangun ketahanan pangan setempat. Lahan seluas itu akan dimaksimalkan sebagai salah satu prinsip utama dari ekonomi sirkular pangan. Kemudian juga dilakukan intensifikasi berkelanjutan, termasuk perluasan terhadap lahan menjadi minimal 25.600 ha atau 10 persen dari luas wilayah IKN.

Adapun untuk lahan pertanian secara keseluruhan di Kaltim, terutama di daerah yang dekat dengan IKN, diperlukan pendekatan berbasis data sebagai proyeksi penggunaan lahan, produktivitas pangan, serta konsumsi pangan yang digerakkan oleh usaha-usaha intensifikasi berkelanjutan hingga tahun 2045.

Hal lain yang sedang dilakukan Tim OIKN adalah penentuan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), mulai dari perencanaan, inventarisasi, identifikasi, penelitian, penetapan, pengembangan, pembinaan ke masyarakat, hingga pengendalian lahan.

Secara garis besar, strategi ketahanan pangan di IKN terdiri atas berbagai elemen, seperti mempertahankan sebagian aset kawasan pertanian dengan pertanian secara tahunan dengan penduduk sekitar yang berprofesi sebagai petani. Kemudian melakukan intensifikasi berkelanjutan terhadap pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang sedang berjalan di kawasan IKN maupun sekitarnya.

Dalam hal ini, lahan yang ada harus dilakukan intensifikasi, terutama melalui teknologi pertanian guna mendorong

produktivitas. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan kepada petani adalah dengan pembinaan sekaligus pendampingan berkelanjutan.

Hal lain adalah melakukan pengembangan pangan (kawasan lumbung pangan) di Kaltim sebagai lahan relokasi bagi lahan produksi pangan lokal yang terdampak atas adanya pengembangan wilayah IKN. Termasuk membuat rekomendasi urban farming, pemanfaatan sisa pangan, dan evaluasi industri pangan nilai tambah, sebagai pemenuhan ekonomi sirkular produksi pangan dalam kota.

Urban farming perlu dilakukan untuk mendukung budi daya pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan lainnya di sekitar IKN sehingga warga setempat memperoleh nilai tambah yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. "Kita harus mampu memproduksi pangan yang sehat dan berkualitas sehingga pola pertanian yang diterapkan adalah pertanian yang cerdas, yakni pertanian yang tidak menggunakan material kimia, juga tidak mencemari lingkungan. Semua prosesnya dengan menggunakan material organik," kata Myrna.

Myrna dalam Simposium "Memperkuat Ekosistem Pertanian Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan IKN dan Kalimantan Timur" di Samarinda pada 11 Juli lalu



Myrna A Safitri

menegaskan bahwa seluruh rencana pembangunan di IKN tersebut dilaksanakan secara bertahap, cermat, dan berkelanjutan.

Luas LP2B IKN

Pelaksana Tugas Direktur Ketahanan Pangan OIKN Setia Lenggono menyebutkan bahwa proyeksi kebutuhan LP2B di IKN hingga tahun 2045 mencapai 84,25 ribu ha, yang terdiri atas sembilan komoditas utama. Rinciannya, untuk komoditas jagung seluas 19.008 ha lahan LP2B dengan produktivitas mencapai 9,87 ton per ha, untuk memenuhi konsumsi sebanyak 100.270 ton per tahun guna menopang penduduk IKN sekitar 1,9 juta jiwa pada 2045.

Untuk komoditas beras membutuhkan lahan seluas 22,45 ribu ha dengan proyeksi produktivitas mencapai 9,87 ton per ha, guna memenuhi konsumsi penduduk IKN, dengan kebutuhan 221.630 ton per tahun, atau setiap penduduk mengonsumsi beras rata-rata sebanyak 116,6 kg per tahun. Untuk komoditas sayur mayur, kebutuhannya diprediksi sebanyak 217,25 ribu ton pada 2045 sehingga dibutuhkan lahan LP2B di IKN seluas 13.780 ha dengan produktivitas sebanyak 15,77 ton per ha.

Pada komoditas buah-buahan diproyeksikan membutuhkan lahan seluas 1.605 ha dengan produktivitas 81,12 ton per ha, yang akan menghasilkan buah segar untuk memenuhi konsumsi

sebanyak 130,35 ribu ton per tahun. Selanjutnya komoditas kedelai dan tanaman minyak, yang diharapkan mampu mencukupi kebutuhan warga IKN dengan jumlah 30.525 ton. Untuk mencukupinya dibutuhkan lahan LP2B seluas 15.042 ha dengan produktivitas 2,03 ton per ha.

Kebutuhan singkong dan umbi-umbian lain untuk penduduk IKN pada 2045 diprediksi sebanyak 98.975 ton dan membutuhkan lahan LP2B seluas 3.186 ha dengan produktivitas sebanyak 31,06 ton per ha. Kebutuhan daging ruminansia bagi warga IKN diproyeksikan sebanyak 8.343 ton. Untuk mencukupinya dibutuhkan lahan peternakan seluas 7.299 ha yang mampu menghasilkan daging karkas sebanyak 1,14 ton per ha.

Berikutnya komoditas daging unggas yang diproyeksikan dibutuhkan sebanyak 35.113 ton. Untuk mencapainya diperlukan lahan seluas 1.824 ha yang mampu menghasilkan daging unggas sebanyak 12,84 ton per ha. Untuk susu segar dibutuhkan sebanyak 27.491 ton per tahun atau pada 2045, yang untuk memenuhinya dibutuhkan dukungan lahan seluas 56,25 ha guna memelihara hewan penghasil susu yang mampu memproduksi sebanyak 488 ton per ha/tahun.

Urban Farming

Untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk IKN tidak melulu mengandalkan lahan khusus pertanian, tapi juga bisa didukung melalui pola urban farming atau pertanian perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan rumah, atap gedung, hingga pertanian tanpa tanah seperti hidroponik.

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI Yudi Sastro menilai urban farming dapat mendukung antara 30 hingga 40 persen terhadap kebutuhan pangan di kawasan IKN. Urban farming bisa diterapkan di hampir semua tempat di kawasan IKN mulai di Rumah Tapak Jabatan Menteri pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) roof top pada rumah susun, ruang terbuka hijau (RTH), hingga pekarangan tiap rumah/bangunan.

Untuk mencapai ini, maka penduduk IKN dapat diajak turut mendukung melalui konsep yang dibuat OIKN, sehingga tiap individu akan termotivasi untuk sama-sama mewujudkan. Pendekatan budi daya tanaman pola organik, ramah lingkungan, dan pemanfaatan sampah organik kota dapat diaplikasikan dalam upaya melakukan urban farming, sehingga melalui pola ini dapat menghasilkan bahan pangan sehat dan berkualitas karena tanpa menggunakan material kimia.

Melalui pola ini, maka penduduk IKN dapat memanfaatkan tiap pekarangan untuk ditanami hortikultura yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dengan menggunakan pot, kantong tanam atau polybag, maupun lainnya guna menanam cabai, tomat, sayur, bawang, dan jenis lain yang dibutuhkan.

Ketersediaan lahan seperti yang direncanakan di IKN tersebut memberi kepastian jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk di ibu kota baru tersebut. Bukan hanya cukup secara jumlah, melainkan jenis pangan yang lebih sehat karena seluruh aspek produksi tanaman dan peternakan sejak awal dirancang dengan menerapkan pertanian organik. ***